

## MENINJAU KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH ANTARA THAILAND-KAMBOJA (PEREBUTAN KUIL PREAH VIHEAR)

Jhon Maxwell Yosua Pattinussa

*Universitas Pelita Harapan, Tangerang*

e-mail: jhon.yosua@uph.edu

### ABSTRAK

Sengketa wilayah internasional masih menjadi salah satu isu keamanan paling populer hingga saat ini. Misalnya saja konflik wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara memperebutkan kuil Preah Vihear yang dianggap merupakan identitas bangsa dan berkaitan dengan harga diri bangsa. Selama lebih dari 50 tahun kedua negara bersengketa dan sudah banyak korban jiwa ditimbulkan akibat dari konflik tersebut. Beragam pendekatan serta upaya untuk mencapai perdamaian sudah coba dilakukan oleh berbagai pihak. Ajudikasi internasional melalui *International Court of Justice* membuat keputusan dan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut pada tahun 1962. Tetapi sejak saat itu sampai tahun 2011 silam ajudikasi internasional tidak berhasil meredakan konflik/menjawab permasalahan ajudikasi internasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan berfokus pada dua temuan utama dinamika sikap Thailand terhadap hasil dari ajudikasi internasional dan bagaimana permasalahan tersebut dimanfaatkan oleh kalangan populisme Thailand yang pada akhirnya menimbulkan pertumpahan darah 2011 silam. Penulis melihat hal ini dapat dihindari apabila resolusi konflik diimbangi dengan pendidikan masyarakat yaitu peningkatan *social environment* dan penguatan *bottom – up approach* pada resolusi konflik, supaya perdamaian dan resolusi konflik yang sesungguhnya dapat terwujud bagi kedua negara.

Kata kunci: Preah Vihear, Ajudikasi Internasional, Thailand, Kamboja, Sengketa Wilayah Internasional.

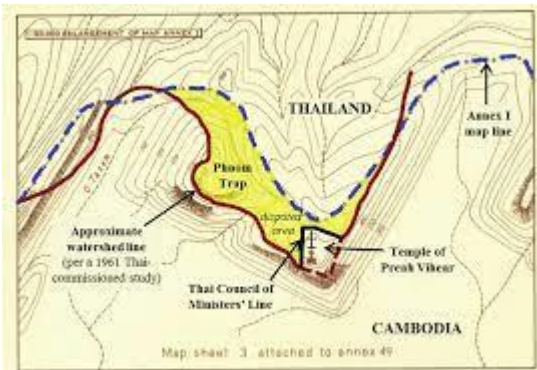
### 1. Introduction / Pendahuluan

Sengketa wilayah adalah sebuah kasus di mana suatu negara memperebutkan kepemilikan atas area lahan/tanah/wilayah milik negara lain/dengan kata lain ada ketidaksepakatan di mana garis perbatasan dibuat/seharusnya berada. Kemunculan sengketa wilayah sudah banyak dijelaskan oleh banyak ahli strategi melalui sudut pandang kepentingan ekonomi dan strategis atau kepentingan demografis yang meliputi: anggota kelompok etnis atau agama; Perbedaan sistem antar negara seperti demokrasi dan komunisme; identitas nasional dan konteks sejarah; hal-hal di atas merupakan penyebab utama yang kerap ditemukan dalam sengketa wilayah pada banyak kasus dalam studi perdamaian.

Sistem pembatasan wilayah yang memicu sengketa wilayah (internasional) masih banyak ditemukan di kawasan Asia

Tenggara sampai saat ini. Penyebab utamanya adalah garis batas negara yang merupakan hasil dari demarkasi era kolonialisme. Pembatasan sepihak yang dibuat oleh negara penjajah dianggap sering kali bertentangan dengan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat negara bersengketa. Meskipun sistem internasional sudah mengalami banyak perubahan sejak masa kolonialisme, serta munculnya lembaga-lembaga internasional yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, persoalan tersebut masih memiliki potensi menyulut konflik. Perubahan-perubahan tersebut tidak menjamin adanya perubahan/masih menyisakan batas wilayah bekas demarkasi penjajah untuk ‘diperebutkan’ negara-negara bekas jajahan (Mishra, 2016). Salah satu konflik yang terbilang cukup lama dan besar adalah sengketa wilayah antara Kamboja dan

Thailand yang didorong oleh sentimen identitas nasional dan masalah kedaulatan. Kedua hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya peningkatan kapasitas militer, penumpukan kekuatan militer, dan penggunaan *alutsista* berat selama konfrontasi bersenjata di sepanjang perbatasan antara kedua negara bersengketa.



Gambar 1: Peta Lokasi Sengketa  
Sumber: <https://www.iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Ciociari-Request-for->

Sengketa perebutan kuil Preah Vihear sudah berlangsung selama lebih dari 60 tahun (terhitung sejak gugatan pertama Thailand pada tahun 1953), dan menyebabkan beberapa dampak besar bagi keamanan dua negara yaitu perpindahan penduduk bagi penduduk lokal yang berada di area seluas 4,6km dari area sengketa, serta kematian puluhan tentara akibat konflik bersenjata di area tersebut. Sengketa wilayah ini disebabkan karena adanya selisih pendapat antara pemerintah Thailand dan pemerintah Kamboja. Kuil Preah Vihear dilihat sebagai kuil yang dicuri dari Thailand akibat dari garis perbatasan negara (annex 1) yang dibuat oleh Prancis sewaktu berakhirnya masa perang dunia II, Prancis waktu itu merebut kuil tersebut dari kekaisaran Siam, dan pada akhir waktu perang justru memberikan kewenangan atas kuil dan area di sekitarnya pada Kamboja.

Identifikasi permasalahan dan rumusan resolusi konflik sudah banyak

dibahas oleh para ahli studi perdamaian dan konflik internasional. Mulai dari upaya bilateral, multilateral, dan bahkan sampai pada adjudikasi internasional di *International Court of Justice* (ICJ). ICJ sudah memberikan putusan pada 1962 bahwa kuil Preah Vihear berada di bawah kewenangan pemerintahan Kamboja berdasarkan aspek sejarah dan asal dari kuil tersebut yang dibuat oleh Kekaisaran Khmer (sekarang adalah Kamboja) pada abad ke-9 M. Namun, keputusan ICJ tidak dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat Thailand sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan sampai 50 tahun setelah putusan pertama ICJ (United Nations, 2013). Hal ini memberikan pertanyaan besar bagi para rekonsiliator perdamaian internasional terhadap solusi yang tepat dalam mengatasi konflik internasional mengingat putusan ICJ dianggap tidak relevan oleh masyarakat dan pemerintah Thailand. Lantas bagaimana seharusnya pendekatan dan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut? Untuk menjawab hal tersebut penulis akan melakukan beberapa analisis dengan menjabarkan faktor sejarah dari masing-masing pihak serta *claim* yang diajukan dan upaya-upaya yang sudah ditempuh sejauh ini sehingga pada bagian akhir dari tulisan ini penulis dapat memberikan masukan dari temuan-temuan penulis.

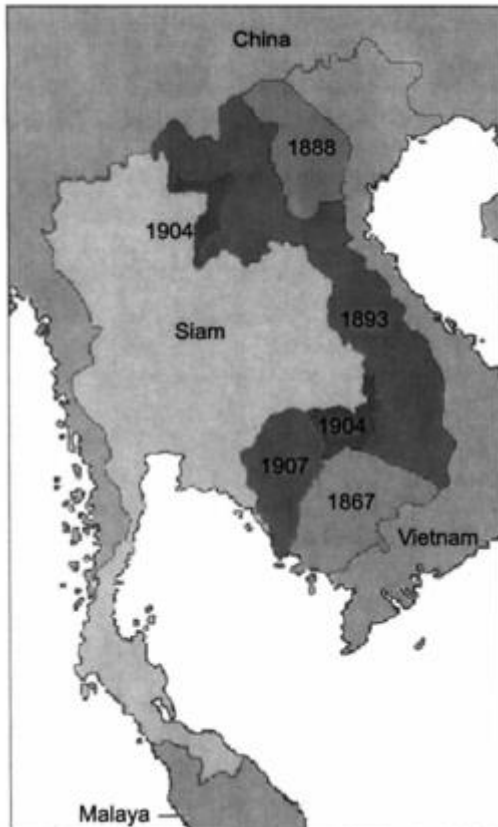
## 2. Literature Review / Tinjauan Pustaka

Dalam bagian ini penulis hendak memberikan gambaran terkait studi-studi terdahulu terkait topik yang dibahas, guna memberikan gambaran singkat mengenai isu yang dibahas pada tulisan ini.

### 2.1 Kuil Preah Vihear sebagai Simbol

Shane Strate dalam tulisannya yang berjudul *A pile of stones? Preah Vihear as a Thai symbol of National Humiliation* mengatakan bahwa Kuil Preah Vihear dilihat

sebagai simbol penghinaan, karena wilayah tersebut merupakan bentuk dari ‘penjajahan’ barat secara tidak langsung. Shane Strate berpendapat bahwa kejatuhan Preah Vihear ke tangan Prancis pada tahun 1904 (sejak



Gambar 2: Wilayah yang hilang dari Siam  
Sumber: Jurnal *Southeast Asia Researcher*

dibuatnya peta *annex 1* oleh Prancis yang pada saat itu menguasai wilayah Vietnam, Kamboja, dan Laos) merupakan puncak dari kejatuhan Kerajaan Siam yang berturut-turut selama beberapa dekade sebelumnya kehilangan wilayah bagian utara akibat okupansi dari Tiongkok dan Prancis dari tahun 1888-1907. Selain itu, Shane juga menambahkan bahwa kekalahan kerajaan Siam sampai saat ini masih menjadi momok bagi kalangan *Royalist-Nasionalist* di Thailand (Strate, 2013).

Begitu juga dengan pihak dari Kamboja. Dalam tulisan berjudul *Request for*

*Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)* dalam jurnal *The American Journal of International Law* John D. Ciorciari melihat bahwa klaim dasar Kamboja dalam permintaan interpretasi makna dari putusan ICJ 1962 pada tahun 2011 silam memberikan penekanan mendasar bahwa masyarakat dan pemerintah Kamboja melihat kuil Preah Vihear sebagai simbol keberadaan masyarakat Kamboja sejak seribu tahun lalu. John D. Ciorciari melihat bahwa kuil tersebut sering dilihat sebagai simbol kekalahan kekaisaran Khmer, tetapi pada masa kini keberadaan kuil lebih dilihat sebagai identitas masyarakat Kamboja. Atas dasar gugatan inilah Kamboja berhasil menang karena klaim dinilai lebih kuat dari pada pihak Thailand (Ciorciari, 2014). Sedikit penekanan dari sudut pandang lain diberikan oleh Sandip Khumar Mishra dalam tulisannya yang berjudul *The Colonial Origins of Territorial Disputes in South Asia* dalam jurnal *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, Vol. 3, No. 1 yang menyatakan bahwa simbol-simbol tersebut menjadi sengketa tak berujung diakibatkan dari interpretasi post-kolonialisme barat (Mishra, 2016), sehingga Sandip Khumar Mishra menilai bahwa negara-negara korban di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara harus menilai simbol-simbol tersebut dengan upaya-upaya nir-kekerasan.

## 2.2 Permasalahan Lanjutan dalam Sengketa

Panchali Saika dalam jurnal laporan *Institute of Peace and Conflict Studies* dan tulisannya yang berjudul *The Dispute over Preah Vihear: Seen Problems, Unseen Stakes* mengatakan bahwa sengketa yang terjadi bukan hanya soal wilayah dan sumber daya seperti kebanyakan sengketa di dunia (Saikia, 2012). Justru dalam dinamika sengketa selama 60 tahun, kedua pemerintahan terlihat

memanfaatkan momentum tertentu untuk tujuan tertentu. Mendukung pernyataan tersebut Sang Kook Lee dalam jurnal berjudul *Siam mismapped: Revisiting the territorial dispute over the Preah Vihear temple* menyimpulkan bahwa permasalahan utama dari konflik yang terjadi adalah bukan hanya sekedar memberikan jawaban dari sengketa wilayah tetapi menjawab permasalahan krisis identitas dari kedua belah pihak akibat konflik yang terjadi selama 60 tahun ini (Lee, 2014).

Brendan Borell dalam jurnal berjudul *The Battle Over Preah Vihear A territorial dispute involving a 1,100-year-old Khmer temple on the Thai-Cambodian border turns violent* mengatakan bahwa konflik perebutan wilayah ini sudah terjadi lebih dari satu abad, dan hal ini menandakan bahwa sengketa tersebut lebih tua/melebihi pemahaman dan keyakinan resolusi konflik modern sehingga tidak mungkin jawaban dari sengketa kuil yang berusia 1100 tahun tersebut dapat diputuskan dengan mudah bahkan oleh ICJ sekalipun (Borrell, 2013), mengingat hal ini sudah menjadi identitas dari kedua pihak.

### **2.3 Pendekatan dalam Menyelesaikan Sengketa Wilayah**

Jawaban dari permasalahan sengketa kuil Preah Vihear banyak dijawab dengan pendekatan antar negara. Hal ini terbukti dengan adanya aktor-aktor internasional yang berperan penting dalam upaya menemukan jalan tengah untuk kedua pihak, dan sampai akhirnya berlabuh di ICJ. Pendekatan top-down dianggap sangat tepat untuk menjawab permasalahan antar negara. Carrie Menkel-Meadow dalam tulisannya yang berjudul *The Historical Contingencies of Conflict Resolution* mengatakan bahwa banyak sekali kasus sengketa dan konflik internasional yang sampai saat ini masih bersifat kontijensi (Menkel-Meadow, 2013), sehingga Carrie Menkel-Meadow berpendapat bahwa salah

satu upaya memberikan kepastian hukum pada konflik internasional adalah dengan memberikan kewenangan penuh pada negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sedikit berlawanan dengan Carrie. Jay Rothman dalam tulisannya yang berjudul *Correlation of Theory and Practice in Conflict Engagement* mengatakan bahwa pendekatan dalam permasalahan sengketa wilayah harus dilakukan menggunakan pendekatan top – down dan bottom – up. Menurut pengalamannya dalam konflik perebutan wilayah Israel-Palestina kombinasi dari dua pendekatan dianggap sebagai jalan terbaik (Jay Rotman, dkk., 2014). Selaras dengan Jay Rothman Peter Wallensteen dalam bukunya yang berjudul *Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and the Global System* mengatakan bahwa setelah berakhirnya perang dunia dan perang dingin ada banyak pakta perdamaian yang dibuat sebagai tindakan lanjutan dari upaya negara-negara yang terlibat bersengketa. Tentunya pakta tersebut dibuat di bawah pengawasan bersama dan dengan memperhatikan kepentingan dari kedua pihak yang bersengketa (Wallensteen, 2002).

### **3. Research Method / Metode Penelitian**

Pada tulisan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan tersebut memungkinkan penulis untuk memberikan interpretasi lebih mendalam terhadap suatu fenomena atau satu isu tertentu. Selain dari pada pendalaman interpretasi kemudahan jenis data dalam pendekatan kualitatif yang dapat dengan mudah diakses melalui berbagai sumber membuat penulis memilih pendekatan tersebut. Keterbatasan penulis membuat penulis harus memilih alternatif pendekatan yang memungkinkan untuk mengakses data dengan mudah (contoh: studi-studi kepustakaan, dll.) guna menjaga obyektivitas dan kedalaman dalam analisis.

*“Data in IR is widely available and rapidly growing. In relation to secondary sources alone, there are an increasing number of online traditional and nontraditional media resources, electronic databases, and libraries that are all easily accessible to the researcher. As such, knowing where to begin data collection is as important as knowing what techniques are available, through which data can be interpreted”* (Lamont, 2015). Penulis dapat memberikan interpretasi mendalam dan sesuai dengan kerangka berpikir dan narasi yang hendak dibangun berdasarkan pertanyaan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan disajikan dengan menggunakan metode deskriptif-eksplanatif, guna menjaga konsistensi penggunaan studi-studi pustaka sebagai sumber utama.

#### **4. Results and Discussion / Hasil dan Analisis**

##### **4.1 Timeline Sengketa**

Tahun 1954, setelah Kamboja merdeka dari Prancis pada tanggal 9 November 1953. Thailand mengajukan gugatan wilayah perbatasan termasuk kuil Preah Vihear dan langsung mendirikan pos jaga perbatasan di sekitar wilayah kuil (Tun, 2011). Sejak saat itu bentrokan bersenjata antara pasukan penjaga perbatasan Thailand dan Kamboja sering terjadi. Setelah beberapa bentrokan di area perbatasan, Pemerintah Kamboja mengajukan gugatan ke *International Court of Justice* (ICJ).

Pada tahun 1962, berdasarkan gugatan dan data yang diserahkan oleh pemerintah Kamboja dan Thailand. ICJ menemukan bahwa Kuil Phear Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja. Oleh sebab itu, ICJ mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Thailand harus menarik pasukan militer, alutsista, polisi, dan penjaga area perbatasan serta pos penjagaan di sekitar wilayah sengketa karena menurut putusan

ICJ wilayah tersebut merupakan milik Kamboja. Setelah putusan tersebut konflik sempat mereda selama beberapa tahun (tidak ada konflik besar), namun masih terdapat beberapa konflik kecil, seperti misalnya masih adanya petugas patroli Thailand yang dianggap masuk ke teritori kawasan Kamboja. Hal tersebut berlangsung selama beberapa puluh tahun. Hingga pada tahun 2000 dibuatnya nota kesepahaman.

Pada tahun 2008-2011, terjadi eskalasi besar terhadap konflik tersebut. Hal ini disebabkan karena pemerintah Thailand dianggap tidak mematuhi aturan ICJ (akibat dari masih adanya tentara/petugas patroli perbatasan yang masuk hingga ke daerah kuil, dan kuil masih digunakan oleh para penduduk Thailand di sekitar perbatasan). Menurut interpretasi Thailand putusan ICJ pada tahun 1962 tidak meliputi kuil Preah Vihear, putusan hanya berlaku untuk wilayah di sekitar kuil. Kemudian kedua negara mengajukan gugatan, Thailand menggugat wilayah di sekitar kuil. Sedangkan Kamboja menggugat ‘interpretasi yang sebenarnya’ dari putusan 1962 guna menegaskan kepada Thailand terkait permasalahan tersebut. Perubahan sikap Thailand terlihat dari perubahan arah politik mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang mengingkari nota kesepahaman tahun 2000 silam. Memanasnya area perbatasan sampai menjadi *military zone* diakibatkan karena adanya ketegangan dalam negeri Thailand (polarisasi kekuatan politik antara pendukung Thaksin (baju merah) dan pihak oposisi (baju kuning, demokrat, militer, dan istana). Hal tersebut menyudutkan Thaksin dan membuat Thaksin harus mengambil manuver ke arah kebijakan ‘konservatif’ dengan membiarkan ketegangan di perbatasan, dan pada akhirnya menyulut konflik bersenjata selama 2 bulan di perbatasan.

Pada 2011, ICJ memberikan putusan final dan interpretasi menyeluruh terhadap

putusan sebelumnya (re: keputusan 1962). Bahwa kuil dan wilayah di sekitarnya adalah milik Kamboja dan berada di bawah kedaulatan pemerintah Kamboja. Akhirnya Thailand sekali lagi dituntut untuk menarik pasukannya dari area perbatasan. Namun, sampai saat ini masih banyak harapan dari kalangan konservatif terhadap pemerintah supaya kuil Preah Vihear bisa berada di bawah kekuasaan Thailand (Ngoun, 2012).

#### 4.2 Peran Aktor dalam Konflik

Ada dua aktor negara Thailand dan Kamboja, serta satu aktor internasional ICJ (International Court of Justice) dan Thai-Cambodia Joint Commission. Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai aktor terlibat serta perannya, dan kepentingan serta relasi antar aktor. Pertama adalah Kamboja, dalam sejarah pembangunan kuil Khmer Empire (kerajaan yang bertransformasi menjadi Kamboja saat ini) pada abad ke-11. Tetapi dalam perjalanannya di abad ke-15 Khmer Empire mengalami kejatuhan, dan terpaksa menyerahkan hak teritorialnya kepada kerajaan Siam (dikenal sebagai Thailand saat ini). Penyerahan hak teritorial yang dimaksud, termasuk dengan kuil Preah Vihear di dalamnya. Meskipun selanjutnya ‘kepemilikan’ hak atas kuil tersebut berpindah-pindah akibat dari penjajahan Prancis, Kamboja melihat Preah Vihear memiliki nilai sejarah (peninggalan Khmer Empire). Selain dari pada peninggalan sejarah, kuil ini juga merupakan simbol ‘hinaan’ bagi Kamboja. Mengingat Khmer Empire yang besar dan berjaya pada masa itu, harus tunduk dan dikalahkan oleh kerajaan Siam (Thailand). Sehingga tidak heran bahwa Pemerintah Kamboja berniat untuk mengembalikan kuil tersebut kepada masyarakat Kamboja selama kurang lebih 50 tahun masa sengketa.

Thailand dalam sengketa Preah Vihear memulai klaim pada kuil tersebut

karena melihat bahwa perampasan atas teritorial tersebut, dilakukan bukan oleh Kamboja atau Khmer Empire (di masa lalu), melainkan oleh Prancis dengan garis demarkasi yang dibuat ‘sepihak’. Penulis melihat keberatan paling utama dari Thailand dalam proses penyelesaian ajudikasi internasional melalui ICJ, diakibatkan karena ICJ membuat keputusan berdasarkan annex 1 (peta yang dibuat oleh Prancis pada masa perang dunia ke dua, untuk membatasi perbatasan di antara wilayah jajahan Prancis dan kerajaan Siam), mengakibatkan sikap Thailand yang sepertinya terlihat plinplan selama 50 tahun sengketa berjalan. Melihat dari perspektif ini, penulis menemukan hal menarik yaitu setelah kerajaan Siam merebut kuil Preah Vihear dari Khmer Empire, hak kepemilikan teritorial atas kuil tersebut ditentukan oleh Prancis karena berhasil menguasai Kamboja, dan Jepang yang mana pada perang dunia ke dua sempat menang melawan Prancis di Asia Tenggara (karena Jerman berhasil menguasai Prancis, dan kekuatan *Axis* mendominasi dunia pada waktu itu), kemudian Jepang memberikan kembali kewenangan teritorial kuil tersebut kepada sekutunya, Siam.

Berikutnya adalah peran ICJ sebagai ajudikator dari permasalahan sengketa kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja. ICJ mencoba menelusuri pendapat dari kedua pihak, dan melihatnya secara historis. Beberapa temuan ICJ justru memberatkan Thailand, salah satunya peta “annex 1” yang dibuat oleh Prancis pada tahun 1907, sebagai ganti dari kedaulatan kerajaan (re: Kerajaan Siam tidak dijajah oleh Prancis/tetap merdeka), Siam harus merelakan hak teritorialnya diambil oleh Prancis (termasuk kuil Preah Vihear). Map tersebut menjadi salah satu bukti kuat, karena Thailand/kerajaan Siam pada waktu itu, tidak pernah mengajukan keberatan sampai dengan tahun 1953. ICJ membuat keputusan akhir

dengan mempertimbangkan bahwa kuil tersebut dibuat oleh Khmer Empire (Kamboja saat ini) dan Siam 'mengakui' kedaulatan tersebut (dengan tidak mengajukan keberatan atas "annex 1"), artinya Thailand melepas hak teritorialnya atas kuil tersebut. Oleh karena itu, ICJ membuat keputusan final yaitu kepemilikan kuil Preah Vihear diberikan ke Kamboja.

#### **4.3 Temuan Penulis (Dinamika dan Masukan)**

Penyelesaian sengketa kuil Preah Vihear melalui ajudikasi internasional masih menyisakan masalah. Permasalahan ini pada dasarnya bukan hanya merupakan masalah perbatasan wilayah, atau konflik 'perebutan cagar budaya', sebaliknya penulis menemukan bahwa etnis atau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan kuil berasal dari suku Kui, kelompok RAS minoritas bagi Kamboja dan Thailand, sehingga jelas bahwa konflik yang terjadi bukan soal identitas (budaya). Penulis melihat bahwa konflik tersebut terjadi karena adanya upaya atau semangat balas dendam di antara Thailand dan Kamboja, mengingat bahwa kedua negara dari awal melihat kuil tersebut sebagai simbol 'kekalahan' (Strate, 2013). Masyarakat Kamboja melihatnya sebagai kejatuhan masa ke-emas-an *Khmer Empire* dan dipaksa tunduk kepada kerajaan Siam (Thailand). Begitu juga bagi masyarakat Thailand, kuil Preah Vihear merupakan simbol kejayaan kerajaan Siam, sebelum akhirnya ditekan oleh pihak barat. Penulis menyimpulkan bahwa penguasaan terhadap kuil merupakan simbol kemenangan bagi masing-masing negara.

Dalam penyelesaian masalah tersebut Kamboja berusaha membawanya dalam ajudikasi internasional melalui ICJ, dan seperti yang sudah penulis katakan sebelumnya, Kamboja menjadi pemenang atas kasus tersebut. Thailand terpaksa

menghormati keputusan ICJ, karena memerlukan dukungan dari dunia barat pada masa itu (konteks perang dingin). Tetapi kemudian pada tahun 1990an setelah perang dingin berakhir, dan pasukan Vietnam menarik diri dari Kamboja isu mengenai kepemilikan Preah Vihear kembali menguat. Di bawah kepemimpinan perdana menteri Samak Sundaravej, Thailand menjaga perdamaian yang terjadi di kawasan sengketa tersebut dan menghormati keputusan ICJ. Akan tetapi keputusan tersebut mendapat perlawanan keras dari fraksi nasionalis Thailand (konservatif), dan meminta revisi. Hal tersebut memperkuat argumen penulis bahwa konflik tersebut bukan hanya soal budaya, tetapi juga harga diri bangsa. Kaum konservatif setelah 50 tahun bersengketa, mulai dari masyarakat sampai kepada politikus partai sepakat untuk mengangkat isu tersebut kembali. Hal ini menyebabkan adanya eskalasi, meningkatkan ketegangan kedua pihak sampai benturan pasukan bersenjata di antara tahun 2009 sampai tahun 2011, mengakibatkan kematian 34 petugas bersenjata dan 30.000 orang diungsikan dari daerah sekitar konflik.

Pada 28 April 2011, Kamboja mengajukan kembali sengketa ke ICJ untuk memastikan interpretasi dari keputusan ICJ mengenai kuil Preah Vihear sebelumnya pada tahun 1962. Setelahnya dua setengah tahun kemudian ICJ menginterpretasikan keputusan 1962, yaitu Kamboja memiliki kedaulatan penuh terhadap kuil, serta lahan di sekitarnya. Sehingga Thailand harus menarik pasukan bersenjata yang selama ini bertugas menjaga perbatasan sekitar. Fakta bahwa pemerintah Thailand masih terus berusaha bahkan selama bertahun-tahun berjaga-jaga di sekitar kuil, merupakan bentuk nyata dari niat pemerintah untuk melindungi kuil, dan 'menjaga apa yang seharusnya menjadi milik negara dan yang merupakan simbol kejayaan bagi masyarakat'.

Ada dua hal yang penulis nilai sangat penting untuk diperhatikan, yang pertama adalah fakta bahwa ICJ mengeluarkan dekret dan interpretasi terkait putusan mengenai sengketa kuil Preah Vihear, merupakan bentuk kekalahan Thailand terhadap kasus tersebut (kemenangan Kamboja dan pembalasan Khmer Empire terhadap Siam (terkait harga diri bangsa)). Sementara tuntutan utama Thailand pada tahun 2011 silam adalah menjadikan kawasan di sekitar kuil, untuk masuk ke dalam bagian teritorial negara. Penulis melihat bahwa Thailand berusaha menemukan titik temu dalam permasalahan pelik tersebut. Tetapi ada beberapa kejanggalan, seperti tidak adanya ketentuan yang diajukan Thailand terkait bagaimana detail pembagian wilayah di sekitar kuil, penulis melihat penawaran Thailand bersifat ambigu dan berpotensi berisikan kepentingan.

Garis demarkasi yang akan dibangun dan bagaimana ketentuannya harus didasarkan pada dua kepentingan. Serta merupakan hasil diskusi serta kesepakatan bersama antara Thailand dan Kamboja. Di bawah perdana menteri Yingluck Shinawata, pemerintah Thailand menawarkan hal tersebut. Akan tetapi di tahun 2014, ketika hal ini menjadi perbincangan nasional. Kalangan nasionalis Thailand Yingluck Sinawarta justru mengatakan bahwa pemerintahannya tidak pernah menawarkan hal tersebut, atau bahkan setuju untuk melepas kawasan tersebut sepenuhnya untuk Kamboja. Perubahan-perubahan tersebut mengindikasikan bahwa upaya 'perdamaian' yang telah dilakukan selama ini rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, karena kesempatan itu digunakan oleh Yingluck untuk mendulang suara menjelang pemilihan (populis).

## 5. Conclusion / Kesimpulan

Penulis menyimpulkan beberapa hal terkait proses penyelesaian sengketa kuil Preah Vihear. Pertama, penyelesaian ajudikasi internasional tidak cukup untuk menyelesaikan masalah laten yang ada di antara Kamboja dan Thailand. Karena sebenarnya bukan hanya soal identitas, atau sejarah, tetapi hal ini secara perlahan masuk kepada pikiran dan hati masing-masing orang. Masyarakat Thailand (konservatif) melihat kuil tersebut sebagai harga diri bangsa, dan titik bersejarah. Sehingga ada luka dari masa lalu yang tidak akan pernah bisa diobati, apabila kuil tersebut jatuh ke tangan bangsa lain. Begitu juga sebaliknya dari perspektif Kamboja, apabila kuil tersebut jatuh ke tangan Thailand. Hal tersebut dianggap penghinaan bagi masyarakat Kamboja, karena sebenarnya kuil Preah Vihear dibangun oleh bangsa mereka. Dalam menyelesaikan masalah seperti ini, tidak cukup hanya dengan dekret atau keputusan internasional. Keputusan sepihak dari level negara atau bahkan keputusan dari tingkat internasional sekalipun, tidak akan mampu untuk membendung dan menyelesaikan permasalahan laten tersebut.

Kedua, tidak adanya pendekatan yang tepat kepada masyarakat, tentang 'harga diri' bangsa, dan nilai-nilai sejarah sehingga kedua bangsa terus bersitegang akibat memperebutkan kuil tersebut demi 'harga diri' bangsa dan negara. Karena tidak adanya pendidikan/edukasi, penyuluhan, dan pemaparan yang jelas dari pemerintah untuk setidaknya-tidaknya mengurangi rasa kebencian masyarakat, serta 'harga diri bangsa' yang salah, menyebabkan isu-isu seperti ini bisa digunakan oleh para aristokrat atau politikus untuk mendulang dukungan/opini publik dengan cepat dan efektif. Populisme yang tengah berkembang di masa kini bisa menjadi suatu masalah baru, mengingat bahwa tensi konflik kuil Preah Vihear selalu naik turun



tergantung pada siapa pemimpin pemerintahan, serta kepentingan negara saat itu. Niscaya dengan pendekatan yang tepat tidak perlu lagi ada yang harus dirugikan karena klaim 'objek/symbol kebanggaan bangsa' tersebut. Harus ada pendekatan yang bersifat bottom → up, pertimbangannya karena pendekatan top → down pemerintah selama 50 tahun tidak membuahkan hasil apa pun terutama bagi Thailand, mengingat sentimen dalam negeri dari golongan konservatif sangat tinggi. Pendekatan atau gerakan-gerakan yang dimaksud oleh penulis adalah seperti pendidikan publik, dan pendidikan resolusi konflik sejak dini.

Pendekatan dan gerakan seperti pendidikan publik dan resolusi konflik yang dimaksud oleh penulis adalah pendidikan perdamaian, yakni setelah posisi damai sudah dicapai kedua belah pihak harus berusaha supaya tidak ada lagi eskalasi berikutnya, supaya konflik ini tidak menjadi lebih panjang. Harus ada peace building terkait *potential peace dynamic* supaya perdamaian yang sudah dicapai bisa berlangsung lebih lama. Misalnya saja penulis mengambil

contoh gerakan masyarakat Amerika Serikat pada waktu perang dingin, gerakan-gerakan akar rumput yang berusaha mendorong perubahan sikap pemerintah pada waktu perang Vietnam membuahkan hasil penarikan pasukan Amerika Serikat dari daratan Vietnam. Hal ini jelas memberikan kesadaran baru bagi para akademisi studi perdamaian bahwa pendekatan bottom → up merupakan gerakan terkuat dalam negara-negara modern di mana *social environment* menjadi salah satu kunci utama (Jeong, 2000). Pemerintah dari kedua negara tidak bisa mengabaikan lagi hal-hal detail seperti ini, meskipun terlihat minor, tetapi cara tersebut merupakan cara paling ampuh untuk menyelesaikan masalah laten dalam sebuah konflik. Dengan cara demikian penulis mengharapkan perdamaian yang sudah dan yang hendak dituju dapat tercapai. Hubungan bilateral Thailand dan Kamboja bisa terus terjalin serta mengurangi dan dapat memberikan masukan terhadap konflik-konflik wilayah serupa yang masih banyak terjadi di seluruh dunia sampai saat ini.

## REFERENCE / REFERENSI

- Borrell, B. (2013). The Battle Over Preah Vihear A territorial dispute involving a 1,100-year-old Khmer temple on the. *Archaeology Vol. 66, No. 2*, 53-56. Retrieved from :  
<https://www.jstor.org/stable/10.2307/26928682>
- Ciorciari, J. D. (2014). Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand). *The American Journal of International Law, Vol. 108, No. 2*, 288-295. Retrieved from  
<https://www.jstor.org/stable/10.5305/amerjintelaw.108.2.0288>
- Jay Rotman, dkk. (2014). *Correlation of Theory and Practice in Conflict Engagement*. Deen Haag: Eleven International Publishing.
- Jeong, H.-W. (2000). *Peace and Conflicr Studies: An Introduction*. Ashgate: Sydney.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: Sage.
- Lee, S. K. (2014). Revisiting the territorial dispute over the Preah Vihear temple. *South East Asia Research, Vol 22, No. 1*, 39-55. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/23752499>
- Menkel-Meadow, C. (2013). The Historical Contingencies of Conflict Resolution. *International Journal of Conflict Engagement and Resolution*, 32-55. Retrieved from  
<https://www.jstor.org/stable/26928167>
- Mishra, S. K. (2016). The Colonial Origins of Territorial Disputes in South Asia. *The Journal of Territorial and Maritime Studies , Vol. 3, No. 1* , 5-23. Retrieved from  
<https://www.jstor.org/stable/10.2307/26664123>
- Ngoun, K. (2012, Januari 27). *Thai–Cambodian conflict rooted in historty*. Retrieved from East Asia Forum: <https://www.eastasiaforum.org/2012/01/27/thai-cambodian-conflict-rooted-in-history/>
- Saikia, P. (2012). *The Dispute over Prea Vihear: Seen Problems, Unseen Stakes*. New Delhi: Institute Institute of Peace and Conflict Conflict Studies. Retrieved from  
<http://www.jstor.com/stable/resrep09270>
- Strate, S. (2013). A pile of stones? Preah Vihear as a Thai symbol of National Humiliation. *South East Asia Research*, 41-68. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/23752586>
- Tun. (2011). Case: Disputover Preah Vihear Temple. *7th Berlin conference on Asian Security (BCAS) Territorial Issues in Asia Drivers, Instruments, Ways Forward, Sriftung Wissenschaft tun Politik German Institute for International and Scurity Affairs* (pp. 3-4). Berlin: Sriftung Wissenschaft and Politics.

United Nations. (2013, November 11). *UN court rules for Cambodia in Preah Vihear temple dispute with Thailand*. Retrieved from UN News:  
<https://news.un.org/en/story/2013/11/455062-un-court-rules-cambodia-preah-vihear-temple-dispute-thailand>

Wallensteen, P. (2002). *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. London: Sage.